

## EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PUSKESMAS KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jamrah<sup>1\*</sup>, Saimi<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Magister Administrasi Kesehatan, Universitas Qamarul Huda

Email Korespondensi: [jamrah.enje73@gmail.com](mailto:jamrah.enje73@gmail.com)

Disubmit: 20 Juni 2025

Diterima: 23 Februari 2026

Diterbitkan: 01 Maret 2026

Doi: <https://doi.org/10.33024/mahesa.v6i3.21220>

### ABSTRACT

*Risk control in healthcare facilities (fasyankes) creates a healthy, comfortable, safe, and secure working environment, so healthcare facilities need to implement an Occupational Health and Safety Management System (OHSMS/SMK3). Community health centers (Puskesmas) have not yet organized SMK3, so the implementation of SMK3 and the challenges faced need to be investigated. This study aims to understand the establishment of policies, planning, implementation, monitoring and evaluation, performance review and improvement, and the obstacles in implementing SMK3. This research uses an exploratory qualitative method aimed at understanding the implementation of SMK3 in Puskesmas in West Lombok Regency. Internal policy establishment and occupational safety planning are available and have been socialized, but there is no commitment from the leadership regarding occupational safety. Ten occupational safety standards in healthcare facilities have been implemented, except for regular health examinations or medical check-ups (MCU) which have not been carried out. The OHS team conducts routine monitoring every month and evaluates occupational safety every semester. There has never been any review or performance improvement activity conducted by external parties. The internal challenge is that many people still do not understand occupational health and safety (OHS) in health service facilities, so the implementation of OHS is not comprehensive, coupled with a lack of funding support. The external challenge identified is the absence of support from the relevant agency as the supervisor of OHS implementation at community health centers. The formulation of policies, planning, implementation, monitoring, and evaluation of OHS management systems has been carried out according to regulations but not in accordance with OHS policies, while the stage of review and performance improvement by external parties has not occurred, making the role of the health department as supervisor and overseer very necessary.*

**Keywords:** Implementation, OHS Management System, Community Health Centers, West Lombok.

### ABSTRAK

Pengendalian risiko di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) menciptakan lingkungan kerja sehat, nyaman, selamat, dan aman sehingga fasyankes perlu menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Puskesmas belum mengorganisasikan SMK3 sehingga penerapan SMK3 dan kendala yang dihadapi perlu diteliti. Mengetahui penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, peninjauan dan peningkatan kinerja dan kendala dalam penerapan SMK3. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif yang bertujuan mengetahui pelaksanaan SMK3 di Puskesmas Kabupaten Lombok Barat. Penetapan kebijakan internal dan perencanaan K3 tersedia dan sudah disosialisasikan namun belum ada komitmen dari pimpinan tentang K3. Sepuluh standar K3 di fasyankes sudah dilaksanakan hanya pemeriksaan kesehatan berkala atau MCU belum dilaksanakan. Tim K3 melaksanakan pemantauan rutin setiap bulan, dan evaluasi K3 setiap semester. Belum pernah ada kegiatan peninjauan dan peningkatan kinerja oleh pihak eksternal. Kendala internalnya adalah masih banyak yang belum memahami K3 di fasyankes sehingga pelaksanaan K3 belum komprehensif dan kurangnya dukungan sumber dana. Kendala eksternal terdeteksi belum adanya dukungan dari dinas terkait selaku pembina pelaksanaan SMK3 di puskesmas. Penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SMK3 sudah dilaksanakan sesuai regulasi namun belum sesuai dengan kebijakan K3, sedangkan tahap peninjauan dan peningkatan kinerja K3 pihak eksternal belum ada sehingga peran dinas kesehatan sebagai pembina dan pengawasan sangat diperlukan.

**Kata Kunci:** Penerapan, SMK3, Puskesmas, Lombok Barat.

## PENDAHULUAN

SMK3 di fasyankes adalah bagian sistem manajemen menyeluruh untuk mengendalikan risiko, mendukung layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif oleh pemerintah, pemda, atau Masyarakat (Dirjen P2P Kemkes RI 2019). Pengendalian risiko berhubungan dengan aktivitas proses kerja untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Menurut Kemenkes RI (2016), Keselamatan kerja merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan, dan kerugian terhadap manusia. Hal ini juga berhubungan dengan peralatan, obyek kerja, tempat bekerja, dan lingkungan kerja, secara langsung dan tidak langsung (Katalena, et al 2022).

Kesehatan kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan karena kondisi pekerjaan, perlindungan

pekerja dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Selain itu, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja mengadaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya (Kemkes 2016). Kesehatan Kerja adalah upaya mencegah terjadi cedera yang banyak terjadi pada karyawan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Cedera yang banyak terjadi disebabkan oleh terpeleset, tersandung, dan jatuh (slip, trip and fall) (Kementerian Kesehatan 2016)

Kegiatan K3 di fasyankes dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia fasyankes, pasien, pendamping pasien, pengunjung, serta masyarakat di sekitar dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan, lingkungan, dan aktivitas kerja (Kemkes 2018). Upaya kesehatan kerja ditujukan agar melindungi pekerja untuk hidup sehat dan

terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk akibat pekerjaan. Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan (Nada, Denny, and Setyaningsih 2020) dimaksud adalah dengan upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan pada pekerja (Svinarky and Zulkifli 2021).

Puskesmas di Kabupaten Lombok Barat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terorganisir dan diwajibkan melaksanakan program K3, dalam pelaksanaan K3 di fasyankes meliputi pembentukan dan mengembangkan K3 serta menerapkan standar K3 fasyankes yang disesuaikan dengan karakteristik dan faktor resiko masing-masing fasyankes. (Kemkes 2018).

Dalam penerapan K3 fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan K3 Puskesmas harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (SMK3 Fasyankes) yang merupakan bagian dari sistem manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktivitas proses kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan guna terciptanya lingkungan kerja yang sehat, selamat, aman dan nyaman. Oleh karena itu, penelitian lebih dalam tentang penerapan SMK3 dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut perlu dilakukan. (Kemkes 2018)

Tujuan penelitian ialah mengetahui kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja, peninjauan dan peningkatan kinerja serta kendala pelaksanaan SMK3 di Puskesmas.

## TINJAUAN PUSTAKA

Keselamatan Kerja merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Kesehatan Kerja merupakan suatu bentuk keadaan yang menghindari kesalahan dan kerusakan kerja yang dilakukan oleh para pekerja/karyawan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek (Widodo, 2015). Walaupun ketentuan perihal kesehatan dan keselamatan kerja sudah ditetapkan dan diatur sedemikian rupa, akan tetapi dalam penerapannya banyak kendala yang dihadapi sehingga penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk para pekerja tidak seperti yang diharapkan (Manalu, 2023).

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktivitas perusahaan dapat terwujud maka ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Meilin, 2021).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif yang bertujuan mengetahui pelaksanaan SMK3 di Puskesmas Kabupaten Lombok Barat. "Data didapatkan

melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi dengan subjek manajemen dan tim K3.

### HASIL PENELITIAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdapat 5 tahapan

### PEMBAHASAN

#### Penetapan Kebijakan K3

Kebijakan Pelaksanaan K3 di Puskesmas akan tertuang dalam SK Kepala Puskesmas masing-masing.

“Dalam melaksanakan program K3 Puskesmas kami sudah membentuk Tim K3 yang tertuang dalam SK Kepala Puskesmas selain itu ada juga Tim Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang sudah tertuang juga dalam SK Kepala Puskesmas” (PG1)

“Kebijakan yang sudah kami buat adalah SK Tim MFK, itu dibuat tahun 2022 saat persiapan akreditasi” (PDT1)

“Kami belum ada Tim K3 sendiri karena belum mengetahui dan di Puskesmas kami belum ada staf/karyawan yang dilatih K3” (PDT1)

Di Kabupaten Lombok Barat terdapat 20 Puskesmas sebagian besar belum dilatih tentang K3 fasilitas pelayanan kesehatan. Dari 20 Puskesmas ada 6 Puskesmas yang programnya sudah dilatih K3 Fasyankes.

“Petugas/programer K3 kami sudah pernah dilatih tahun 2024 dan itu dilaksanakan oleh Bapelkes dengan biaya dari Bapelkes atau kementerian. Kami belum membuat komitmen sehingga belum disosialisasi kepada pasien dan pengunjung” (PG1)

SMK3. Tahapan tersebut meliputi, penetapan kebijakan K3 di fasyankes, perencanaan K3 di fasyankes, pelaksanaan rencana K3 di fasyankes, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di fasyankes, dan peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di fasyankes.

Di Semua Puskesmas kabupaten Lombok Barat sudah membuat SK Tim MFK karena berkaitan dengan persyaratan akreditasi puskesmas akan tetapi baru puskesmas yang petugasnya sudah dilatih K3 yang sudah mempunyai Tim K3 yang tertuang dalam SK Kepala Puskesmas masing-masing. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Susilawati et al. 2023) menyatakan Pada penyelenggaraan K3 agar berjalan optimal, efektif, efisien, dan berkesinambungan, Puskesmas dibentuk tim K3 dan sudah ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas. Puskesmas X berkomitmen pada K3, dibuktikan dengan SK pelaksanaan dan tim K3, SDM kompeten, serta dukungan pelatihan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. (Nada, Denny, and Setyaningsih 2020),

#### Perencanaan K3

Fasyankes wajib menyusun perencanaan K3 yang efektif, dengan sasaran jelas dan terukur, berdasarkan identifikasi, kondisi yang ada, serta sesuai peraturan perundang-undangan untuk keberhasilan penyelenggaraan di fasyankes.

“Kami melakukan dan membahas perencanaan bersama tim K3 dan Manajemen Puskesmas terutama perencanaan puskesmas karena pembiayaan K3 tidak ada dari Pusat

atau DAK, dalam perencanaan K3 kami menggunakan pembiayaan dari BLUD”. (PG2)

“Karena program K3 ini belum banyak yang mengerti sehingga dalam perencanaan kami juga sebagai tim MFK merasa kesulitan dalam perencanaan kegiatan K3, apalagi kami belum banyak mengerti tentang K3 dan belum ada pembiayaan tentang pelatihan atau pembelajaran K3 di Puskesmas” (PDT2).

Sesuai hasil wawancara ternyata di Puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Barat belum merencanakan perencanaan program K3 sesuai PMK No 52 tahun 2018. Sesuai dengan hasil penelitian (Nada, et. al 2020) yang menyatakan adanya rencana kerja K3 telah disetujui Kepala Puskesmas Kabupaten Pekalongan, namun belum sesuai Permenkes No 52 Tahun 2018 karena tidak disusun berdasarkan identifikasi risiko, melainkan hanya kegiatan wajib dan tambahan bila diperlukan.

### **Pelaksanaan Rencana K3**

Pelaksanaan rencana K3 dilakukan sesuai rencana yang ditetapkan, pelaksanaan program K3 di Puskesmas se Kabupaten Lombok Barat belum melaksanakan program K3 akan tetapi pelaksanaan program K3 kebanyakan berhubungan dengan perencanaan dari Tim manajemen fasilitas dan keselamatan.

“Kegiatan K3 di Puskesmas kami kebanyakan dilaksanakan oleh Tim MFK seperti pengadaan barang penunjang dan perbaikan fasilitas gedung. Kami hanya melakukan kegiatan seperti yang kami rencanakan seperti senam setiap jum’at bisa dibarengi dengan senam lansia, kami pernah merencanakan

tes kebugaran tetapi tahun ini tidak terlaksana karena menyangkut dengan pembiayaan.”(PDT2)

Di Kabupaten Lombok Barat, Program K3 tidak harus berdiri sendiri atau merencanakan kegiatan sendiri tetapi bisa berkolaborasi dengan kegiatan program lain, akan tetapi perlu ada kegiatan K3 yang spesifik sesuai peraturan perundang-undangan seperti pengendalian potensial bahaya, identifikasi risiko. Seperti hasil penelitian (Susanti, Zulkarnain, and Sari 2023) menyatakan Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Puskesmas Kabupaten OKU akan efektif jika program K3 dapat ditingkatkan secara berkesinambungan sesuai dengan risiko yang teridentifikasi, tetap lakukan pencatatan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan. Senada dengan penelitian ini penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Puskesmas X Kabupaten Bogor tercermin dari adanya kebijakan K3 yang terintegrasi, perencanaan kegiatan K3 yang sistematis, pelaksanaan standar K3 yang mencakup berbagai aspek seperti identifikasi bahaya, penerapan kewaspadaan standar, dan pengelolaan sarana prasarana serta peralatan medis (Listyandini et al. 2025).

Di Puskesmas Kabupaten Lombok Barat pada dasarnya sudah melaksanakan program K3 akan tetapi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi masih belum maksimal sehubungan dengan tenaga atau SDM belum terlatih, perlu diadakan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang K3.

“Memang kami akui pelatihan K3 terhadap tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas belum pernah kami

latih sehubungan dengan lokus kegiatan tidak berorientasi pada K3, kami harapkan program K3 di Puskesmas bisa berkolaborasi dengan kegiatan dari program lainnya” (DK1).

Program K3 di Fasyankes merupakan program tambahan atau bukan program esensial dari Puskesmas sehingga program ini kurang mendapat perhatian dari pemangku kebijakan ditingkat Puskesmas maupun Dinas Kesehatan dan Kabupaten.

“beberapa tahun lalu memang ada pembiayaan kegiatan K3 yang kami lakukan tetapi pembiayaan kegiatan tersebut tidak berkelanjutan apalagi di tahun sekarang ini dengan kebijakan baru dari pusat, kami tidak mendapatkan pembiayaan lagi tentang program K3” (DK1).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pembiayaan untuk program K3 tidak mendapat perhatian baik dari pemangku kebijakan sehingga program K3 belum berjalan maksimal. Perlu adanya terobosan dari Penanggungjawab K3 Dinas Kesehatan untuk melakukan advokasi kepada pimpinan. Seperti, penekanan kepada peraturan menteri kesehatan, menunjukkan data PAK dan KAK sesuai laporan Puskesmas, seperti (Susanto and Enisah 2020) menyatakan dalam pelaksanaan SMK3 perlu memperhatikan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini PP No. 50 tahun 2012 (RI 2012), Permenaker No. 26 tahun 2014 (Kementerian Ketenagakerjaan 2014), Permenkes No 52 tahun 2018 (Kemkes 2018) yang sama-sama menetapkan tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Elvahra 2007). Pelaksanaan SMK3

memerlukan dukungan penuh dari pimpinan, manajemen, dan seluruh unit kerja rumah sakit. Manajemen juga wajib mengidentifikasi sumber daya esensial, termasuk pendanaan, agar pelaksanaan SMK3 berjalan optimal dan berkelanjutan.

### **Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3**

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 Fasyankes dilaksanakan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan/atau audit internal SMK3 di Fasyankes.

“pemantauan kemajuan program K3 dipantau secara periodik namun pelaksanaannya bersamaan dengan evaluasi PPI setiap 6 bulan sekali. Sedangkan untuk pelaporan mutu pelayanan yang mencakup PHBS, APD, mencuci tangan dilaporkan setiap bulan” (PG1)

Pemantauan seharusnya dilaksanakan oleh tim K3 dalam hal ini programer K3 dengan menginspeksi secara teratur terhadap potensi risiko tempat kerja memakai daftar periksa (*check list*) yang telah disusun dan memberikan masukan di tempat yang diperiksa tersebut. Selain itu, tim K3 melakukan tindakan korektif untuk menentukan dan membuat laporan inspeksi yang diajukan kepada pimpinan Puskesmas, walaupun dalam pemantauan tersebut dirasa belum sempurna.

### **Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3**

“Peninjauan dan peningkatan kinerja K3 dari pihak eksternal belum ada akan tetapi beberapa pada bulan April ada peserta pelatihan K3 dari KLU yang melakukan PKL dan menyatakan beberapa sudah sesuai namun memberikan saran untuk membuat

komitmen, memantau petensial resiko di setiap ruangan”(PG1).

Puskesmas KabupatenLombok Barat sering sekali digunakan sebagai lahan Praktek, PKL bahkan Study banding, dengan demikian puskesmas harus mempersiapkan diri dengan hal hal yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja sehingga apa yang diharapkan oleh peserta bisa terpenuhi dan memuaskan.

### **Kendala dalam Pelaksanaan SMK3**

Kendala pelaksanaan SMK3 di Kabupaten Lombok Barat adalah keterbatasan sumber daya manusia, dana, sarana, dan metode. Anggaran penyediaan sarana prasarana K3 terbatas pada usulan tahunan yang tersedia. Pemenuhan sarana dan penyusunan regulasi internal dilakukan bertahap sesuai anggaran dan pokok kegiatan, karena pemahaman K3 masih perlu ditingkatkan secara bertahap kepada seluruh karyawan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pelaksanaan program SMK3 di puskesmas Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan program K3 namun tidak secara khusus karena masih berkolaborasi dengan kegiatan program puskesmas yang lain. Standar K3 sudah dilaksanakan namun satu standar K3 yang belum dilaksanakan di semua puskesmas yaitu pemeriksaan kesehatan berkala (MCU. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan K3 dilakukan secara periodik 2 kali setahun. Namun, pihak puskesmas merasa bahwa pelaksanaan K3 di Puskesmas belum sempurna karena saat ini masih dalam tahap belajar. Tahap peninjauan dan peningkatan kinerja K3 oleh pihak eksternal belum ada. Oleh karena itu,peran Dinas Kesehatan sebagai pembina dan

pengawasan sangat diperlukan.

Kendala yang ditemui ialah adanya keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kriteria fasyankes yang sesuai standar K3 meliputi sumber daya manusia, dana, sarana, dan metode. Upaya yang telah dilakukan melalui sosialisasi pemahaman tentang K3 kesemua karyawan melalui kegiatan identifikasi risiko adalah mengusulkan anggaran setiap tahunnya agar bisa memenuhi kebutuhan pelaksanaan K3, memanfaatkan sarana yang ada, dan mengusulkan ke dikes sebagai pembina pelaksanaan K3 untuk melaksanakan peninjauan kinerja K3 di Puskesmas Kabupaten Lombok Barat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyani, S. T., & Ars, M. (2025). Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3). *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja: Teori, Strategi Dan Inovasi Di Era Modern*, 51.
- Dirjen P2p Kemkes Ri. 2019. “Rencana Aksi Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit 2015-2019.” *Kementerian Kesehatan Ri* 2019(2).
- Elvahra, Zoya. 2007. “Analisa Standar Manajemen Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Rumah Sakit.” *Journal Of Chemical Information And Modeling* 2(1): 1-12.
- Harnawati, R. A. (2024). *Manajemen Risiko Dengan Pendekatan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, Dan Lingkungan (K3I)*. Penerbit Nem.
- Katalena Sidabutar, Dewi Marina, Bernard Hasibuan, And Soehatman Ramli. 2022. “Analisa Penerapan Smk 3

- Fasyankes Mengacu Kepmenkes No. 52 Tahun 2018 Di Puskesmas Medan Deli Dimasa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (Jukmas)* 6(2): 183-89.
- Kementerian Kesehatan. 2016. “Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran Bab.” 4(June): 2016.
- Kementerian Ketenagakerjaan. 2014. “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.” *Kementerian Ketenagakerjaan*: 1-26.
- Kemkes. 2016. “Pmk Nomor 66 Tahun 2016.” (May): 31-48.
- . 2018. “Permenkes Nomor 52 Tahun 2018.”
- Listyandini, Rahma Et Al. 2025. “Kajian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Puskesmas : Studi Kasus Di Kabupaten Bogor.” 5(1): 117-24.
- Manalu, S. P. (2023). *Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Prenada Media.
- Meilin, A., Utami, F. W., Rantini, I. P., Lestari, P., & Sunyoto, K. U. (2021). Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- Nada, Fitria Qotrotun, Hanifa Maher Denny, And Yuliani Setyaningsih. 2020. “Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Puskesmas: Studi Kasus Di Kabupaten Pekalongan.” *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia* 8(2): 98-104.
- Ri, Presiden. 2012. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012.” [Http://Wza](http://wza).
- Setyoko, S. (2017). Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Perusahaan. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, 13(3).
- Susanti, Feby, Zulkarnain, And Novrika Sari. 2023. “Evaluasi Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Puskesmas Kabupaten Oku Tahun 2023.” *Health Information: Jurnal Penelitian* 15(2): 1-11.
- Susanto, Arif, And Enisah Enisah. 2020. “Evaluation Of Occupational Health And Safety Management System (Smk3) Health Service Facilities At Puskesmas Cijagra Lama Bandung City.” *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan* 5(2): 143-51.
- Sultan, M. (2023). *Buku Ajar Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Implementasi Smk3 Di Indonesia*. Deepublish.
- Susilawati, Susilawati, Ratna Lestari Budiani, Iswari Paramita, And Prakasita Puspitasiwi. 2023. “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Di Puskesmas Umbulharjo li Kota Yogyakarta.” *Jurnal Kesehatan Vokasional* 8(2): 112.
- Svinarky, Irene, And Zulkifli Zulkifli. 2021. “Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Buruh Di Kota Batam.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 9(1): 1-14.